

Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul

Laode Machdani Afala

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
laode.machdani@gmail.com

Abstract: This paper intends to provide an overview of how the drama of the conflict took place in the tourist area of Goa Pindul, Gunungkidul Regency. Through the contentious politics approach, this paper concludes that the dynamics of conflict that occurred in the cinde tour of Pindul have increased escalation of conflict along with the development of Goa Pindul tourism that increasingly famous and bring huge profits. This happens because of the conflictual relationship between the actors, namely the government, Pokdarwis, and local communities in the management of Goa Pindul tourist attraction. The conflict was mainly triggered by the presence of an open opportunity structure of economic structure and land ownership that emerged along with the presence of Goa Pindul tourist attraction. The conflict then expanded and involved many actors through the emergence of claims in their bid for rights over the management of the tourist area.

Keywords: Conflict, Actor, Escalation, Political Conflicts, Goa Pindul

Pengantar

Pengkajian terhadap studi ini dimaksudkan untuk menjelaskan serangkaian aktivitas-aktivitas konflikual yang terjadi di sektor pariwisata, khusus terkait dengan pengelolaan daerah wisata Goa Pindul di Kabupaten Gunung Kidul. Fokus penelitian dalam studi ini dibatasi hanya pada melihat kondisi-kondisi yang memicu muncul dan meluasnya perseteruan dalam penge-

lolaan daerah wisata Goa Pindul. Dalam sorot ini, perbincangan mengenai konflik di sektor pariwisata ini dimaksudkan untuk memperkaya khasanah pemikiran dan wawasan keilmuan, terutama terkait dengan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam kajian politik lokal.

Berbeda dengan beberapa kasus konflik lainnya, konflik yang terjadi di daerah wisata Goa Pindul ini berlangsung dalam drama yang masih berada dalam tataran konflik non-

fisik atau tanpa kekerasan fisik. Selain itu, konflik ini dalam perkembangannya mengalami eskalasi yang tidak hanya melibatkan dua pihak saja, tapi telah meluas dengan melibatkan banyak pihak lainnya, yaitu masyarakat lokal, pemerintah, dan Pokdarwis. Munculnya berbagai klaim atas hak pengelolaan daerah wisata Goa Pindul oleh beberapa pihak tersebut menjadi awal dari hadirnya konflik perseteruan, terutama setelah Goa Pindul menjadi salah satu ikon wisata menarik di Kabupaten Gunung Kidul. Meski, konfliknya masih dalam tataran yang bisa ditolerir, namun potensi untuk menjadi konflik dan kekerasan fisik di masa datang bisa saja terjadi jika tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang tepat.

Di era reformasi, pariwisata merupakan sektor publik penting untuk meningkatkan investasi dan devisa negara. Perkembangan ekonomi global ikut mendorong sektor pariwisata ini sebagai salah satu sektor potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebagaimana UU No.10 tahun 2009 pasal 4 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia di sektor pariwisata ini telah dijajaki sejak tahun 1990an, yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah kunjungan yang meningkat pertahunnya. Di tahun 2010-2014, kunjungan wisatawan tersebut semakin meningkat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nasional
2010	7.002.944	-
2011	7.649.731	6,750,416
2012	9.044.462	7,453,633
2013	8.802.129	8,024,876
2014	9.435.411	7,899,070

Sumber: Pusdatin Kemenparekraf & BPS, diolah.

Perkembangan tersebut, ter-kait erat dengan munculnya kebijaksanaan desentralisasi dan perkembangan demokrasi secara besar-besaran di era reformasi yang ikut mendorong pemerintah daerah untuk mengelola potensi-potensi daerahnya dengan maksimal. Salah satu diantara sektor potensial itu adalah pariwisata. Namun demikian, dalam upaya pengembangan dan pengelolaannya di beberapa daerah, hal ini menuai banyak konflik kepentingan. Di dalamnya, keterlibatan aktor-aktor lokal, pebisnis, dan pemerintah memainkan peran penting dalam terjadinya konflik tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Gerry van Klinken dkk bahwa perkembangan desentralisasi dan demokrasi justru didominasi kepentingan-kepentingan *rent-seeking*, termasuk dalam pengelolaan pariwisata.

Konflik di daerah wisata Goa Pindul adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa konflik yang pernah terjadi dalam rentang paska runtuhnya rezim Orde Baru. Dalam beberapa literatur, konflik pengelolaan daerah wisata di Indonesia diantaranya dikemukakan oleh

Basyori (2015) yang menggunakan konsep *governance* dalam menganalisis konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Konsep *governance* ini mengandaikan adanya jalinan kerjasama yang baik diantara berbagai stakeholder dalam pengelolaan daerah wisata. Dalam analisisnya, konflik terus berlangsung disebabkan karena adanya perbedaan perspektif dan konsistensi diantara *stakeholder* dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut pengelolaan kawasan cagar alam. Dengan kata lain, kerjasama antara berbagai *stakeholder* merupakan cara ampuh untuk memperbaiki model pengelolaan kawasan tersebut dan mencegah terjadinya konflik.

Studi lainnya mengenai pariwisata, disajikan oleh Janianton Damanik (2005) dan Henrie Adji Kusworo & Janianton Damanik (2002, yang lebih menekankan proses pembuatan kebijakan (*decision making process*) dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini dimasukdikan sebagai salah satu cara untuk menghindari konflik atau perbedaan cara pengelolaan di sektor pariwisata. Selain itu, keberlanjutan

dan perkembangan dari sektor pariwisata ini bisa lebih terjamin, terutama dalam konteks otonomi daerah. Pada titik ini, proses pelibatan komunitas lokal dalam proses pembuatan kebijakan dianggap sebagai jalan dalam mendorong perkembangan sektor pariwisata sekaligus bisa mencegah konflik di level lokal.

Dalam sudut lain, terkait dengan pengelolaan, sektor pariwisata lebih dilihat sebagai potensi ekonomi besar bagi pertumbuhan ekonomi (*developmentalisme*). Dalam nalar ini, sektor pariwisata dikembangkan justru untuk memenuhi tuntutan kapitalisme global. Alhasil, pengelolaan wisata luput dari kepentingan komunitas atau masyarakat lokal, nilai-nilai kultural dan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata. Model pengelolaan ini biasanya dijalankan oleh korporasi besar sebagai pengembang dan negara-negara liberal-kapitalis. Nalar ini secara implisit terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Tania Li (2007) ketika kehadiran Taman Nasional Lore Lindu menyebabkan terusirnya dan pengabaian masalah kesejahteraan

masyarakat sekitar Taman Nasional tersebut.

Untuk itu, khusus dalam studi ini, kajian mengenai sektor pariwisata tidak hanya didekati melalui konsep *governance*, pembuatan kebijakan publik, ataupun *developmentalisme*, tapi melalui pendekatan konflik perseteruan. Konflik, dalam hal ini, tidak hanya dipandang dari relasi sebab akibatnya, tetapi lebih kepada proses dan mekanisme yang dapat membantu menjelaskan konflik di daerah wisata Goa Pindul. Dengan demikian, dinamika dan eskalasi konflik yang terjadi bisa dijelaskan dengan komperhensif.

Situs Konflik: Objek Wisata Goa Pindul

Goa Pindul sebagai salah satu destinasi wisata mulai dirintis sejak Juni 2010. Lokasi wisata ini terletak di desa Bejiharjo, dusun Gelaran, kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Masyarakat di sekitar daerah wisata ini pada awalnya adalah mayoritas petani, dan Goa Pindul sendiri adalah bekas petilasan panembahan Senopati yang dianggap keramat. Desa Bejiharjo sendiri pada

awalnya merupakan desa budaya yang ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur No. 325/KP-TS/1995 yang pada tahun 2016 diganti dengan SK baru Gubernur DIY No. 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa Budaya.

Atas dasar SK tersebut, di tahun 2010, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengadakan pembinaan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan potensi-potensi wisata alternatif di Kabupaten Gunung Kidul. Goa Pindul menjadi salah satu potensi daerah wisata yang kemudian dilirik dan dikembangkan sebagai daerah wisata baru. Dari pembinaan dan pelatihan Dinas Pariwisata, lahir kelompok sadar wisata yang disingkat Pokdarwis sebagai kelompok yang nantinya mengelola objek wisata Goa Pindul.

Pada awalnya, di Kabupaten Gunungkidul, objek wisata hanya tersebar di sepanjang pantainya, namun setelah sejak 2011 Goa Pindul hadir sebagai alternatif baru destinasi wisata. Melalui bantuan PNPM Mandiri Pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Gunung

Kidul di tahun 2011, Goa Pindul berkembang menjadi salah satu ikon terkenal destinasi wisata di daerah tersebut. Perkembangan Goa Pindul yang semakin pesat pada akhirnya menjadi daya tarik yang banyak dikunjungi wisatawan baik yang berasal dalam negeri maupun luar negeri. Wisata Goa Pindul sendiri menyediakan paket wisata utamanya, yaitu susur gua (*cave tubing*) Goa Pindul yang berjarak sekitar 300 meter, selain situs wisata lainnya.

Akibat perkembangan yang pesat, di tahun 2012, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, objek wisata Goa Pindul mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik di tingkat nasional. Hal ini terkait dengan peningkatan pendapatan daerah (PAD) yang didapatkan dari kehadiran daerah wisata Goa Pindul sebanyak 5 miliar dari 2,5 miliar yang ditargetkan di tahun 2012. Keberhasilan daerah wisata Goa Pindul dipandang sebagai sumber penghidupan dan lapangan pekerjaan terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal desa Bejiharjo. Tercatat, jumlah pengun-

jung perhari berkisar 3.000-15.000 orang di tahun 2016 dengan pendapatan sekitar 9 jutaan sehari. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya, konflik pun terjadi akibat banyaknya pihak yang ingin berebut berkah dari hadirnya daerah wisata Goa Pindul.

Politik Perseteruan: Sebuah Pendekatan Analisis

Studi ini menggunakan pendekatan politik perseteruan (*contentious politics*) dalam upaya untuk menjelaskan proses terjadinya konflik perseteruan. Sydney Tarrow (1996) menjelaskan bahwa pendekatan ini adalah hadirnya struktur-struktur kesempatan, pembingkaihan (*framing*), hingga meluasnya (eskalasi) konflik yang memicu dan melibatkan banyak aktor-aktor.

Dalam memahami politik perseteruan tersebut, pendekatan *dynamic of contention* (DoC) menjadi pisau analisis terbaru yang menyediakan kerangka analisis yang lebih dalam dan beragam (Van Klinken, 2007:17). Dalam nalar ini, proses menjadi hal yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar mengungkapkannya

akibat dari munculnya perseteruan. Beberapa model *DoC* ini diantaranya adalah analisis terhadap proses dari meluasnya konflik (eskalasi), pembentukan identitas, mobilisasi, pembentukan aktor dan varian lainnya. Di studi ini, eskalasi menjadi fokus utama.

Dalam *contentious politics theory* (DoC), McAdam, Tilly, dan Tarrow mengidentifikasi dan mem-bedakan tiga mekanisme yang mem-pengaruhi terjadinya perseteruan (dalam Situmorang, 2013:53). *Pertama*, mekanisme lingkungan. Di dalam mekanisme ini, faktor eksternal memainkan peranan penting mempengaruhi kehidupan sosial. Menurut McCarthy dan Zald penipisan sumber daya adalah salah satu contoh mekanisme lingkungan yang mempengaruhi orang terlibat dalam perseteruan politik. *Kedua*, mekanisme kognitif. Mekanisme ini bekerja melalui perubahan tubuh individu-individu dan persepsi kolektif seperti kata yang diakui atau pemahaman terhadap realitas. *Ketiga*, mekanisme relasi. Mekanisme ini beroperasi dengan cara menjembatani organisasi-organisasi, individu, dan

masyarakat. Mereka menunjukkan perantara dalam membangun gerakan sosial. Secara umum mekanisme didefinisikan sebagai sebuah kejadian yang mengubah hubungan-hubungan di antara elemen-elemen tertentu dan cara-cara serupa. Sebuah contoh sentral tentang mekanisme relasional adalah *brokerage* (perantara), dimana dua unit sosial dibawa memasuki suatu hubungan dengan satu sama lain oleh unit ketiga (Van Klinken, 2007:17).

Dalam hal pembedaan (*framing*), David S. Snow menjelaskan *framing* dalam gerakan sosial terdiri atas dua bentuk (dalam Situmorang, 2013:93). Pertama, *frame bridging*, yang menunjuk kepada sejumlah cara yang dilakukan oleh aktivis memperluas makna dari gerakan agar dapat menghubungkan dua kelompok atau lebih yang sesungguhnya berbagi keluhan yang sama tetapi memiliki keterbatasan organisasi untuk mengekspresikan keluhannya. Kedua, *frame amplification*, yang merujuk kepada sejumlah cara yang dilakukan oleh aktivis untuk membungkus pesan-pesan gerakan dengan cara menonjolkan

aspek-aspek emosional sebuah pesan gerakan melalui aktivitas simbolik mendorong tumbuhnya perlawanan.

Terkait dengan studi ini, singkatnya, mekanisme dan *framing* dalam pandangan beberapa pemikir di atas, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana dinamika dan eskalasi konflik meluas dan melibatkan banyak aktor. Mekanisme diletakan untuk melihat proses dan relasi konflik, sedangkan *framing* digunakan untuk memetakan isu-isu yang menguatkan intensi konflik. Kedua hal tersebut secara tidak langsung bisa menjelaskan proses dan terjadinya eskalasi konflik di Goa Pindul. Dengan demikian, salah satu varian dari analisis politik perseteruan, dalam hal ini, di daerah wisata Goa Pindul bisa dipahami.

Menalar Dinamika dan Eskalasi Perseteruan Konflik

Secara mendasar, konflik adalah sesuatu yang terjadi pada semua orang, dalam arti bahwa konflik adalah sesuatu yang inheren pada diri manusia. Oleh karena itu, sesungguhnya tak ada seorang pun manusia yang bisa lepas dari

keterlibatannya dengan konflik. Perbedaannya adalah hanya pada tingkatan dan efek dari konflik itu sendiri. Selain itu, konflik menimbulkan korban dan resiko pada siapapun. Setiap konflik tentunya memiliki sebab yang menjadi pemicu kemunculannya. Dengan kata lain, hampir semua konflik adalah *by design*. Aktor-aktor utama konflik adalah mereka yang menentukan bagaimana ritme konflik itu dimainkan dan diperagakan dalam berbagai bentuk dan ragamnya. Meski demikian, konflik juga memberikan kontribusi besar bagi lahirnya perubahan sosial (Coser, 1956). Pada alur dramatis ini, konflik yang terjadi di daerah wisata goa pindul menjadi menarik untuk ditelisik lebih lanjut.

Munculnya Wisata Goa Pindul: Awal Perubahan dan Perseteruan

Dalam analisis ini, objek wisata Goa Pindul adalah arena perseteruan berbagai aktor. Perubahan status Goa Pindul dari sekedar goa alamiah yang tidak dikelola, menjadi objek wisata terkenal ikut merubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar objek

wisata. Perubahan dari masyarakat yang pada umumnya berprofesi petani menjadi masyarakat yang beralih profesi baik menjadi pedagang, menyediakan jasa wisata maupun tenaga profesi/keahlian dalam bidang tertentu. Dalam aspek ekonomi, kehadiran objek wisata Goa Pindul juga ikut mendorong tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Perubahan-perubahan tersebut secara tidak langsung ternyata berkontribusi pada perubahan pola-pola relasi sosial masyarakat ke dalam relasi yang konfliktual.

Terkait dengan perubahan tersebut, secara umum, konflik yang terjadi di daerah Goa Pindul dapat diamati dalam dua sebab kemunculannya, hal ini terkait dengan terbentuknya – struktur-struktur peluang atau kesempatan; *Pertama*, muncul struktur kepemilikan (*land ownership*). Perkembangan wisata Goa Pindul telah mendorong munculnya aktor-aktor baru yang berebut hak dalam pengelolaan daerah wisata tersebut. Munculnya pertarungan klaim-klaim kepemilikan dan hak atas Goa Pindul telah berkontribusi secara tidak langsung

pada polarisasi dan pembentukan aktor dalam masyarakat. Klaim-klaim tersebut tidak hanya berasal dari pihak perseorangan dan kelompok masyarakat lokal, tapi juga ikut melibatkan pemerintah daerah untuk terlibat dalam perseteruan klaim atas kepemilikan dan hak pengelolaan wisata Goa Pindul.

Kedua, terbentuknya struktur ekonomi. Kehadiran Goa Pindul sebagai objek wisata telah membuka ruang bagi para aktor-aktor untuk berkompetisi. Hal disebabkan oleh anggapan bahwa objek wisata Goa Pindul merupakan asset yang berharga secara ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam nalar ini, keberadaan Goa Pindul sebagai daerah wisata telah membuka kesempatan bagi para aktor-aktor yang terlibat menjadi *supplier*, yang menyediakan jasa dan layanan serta menjual berbagai produk. Dari hasil penelitian oleh Novitasari (2016) ditemukan bahwa goa pindul telah berkembang menjadi komoditas yang produktif dan prospektif untuk memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi beberapa pihak di daerah itu. Perubahan ini

memposisikan masyarakat dalam relasi kompetisi secara ekonomi dan pada saat yang bersamaan membuka ruang perseteruan.

Dengan demikian, berbagai perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di akibat keberadaan wisata Goa Pindul dapat dipahami sebagai pembentukan struktur-struktur baru yang secara langsung maupun tidak langsung membuka peluang bagi terjadinya kompetisi dan perseteruan bagi beragam aktor dari lingkaran kecil hingga masuk dalam eskalasi yang besar. Pada fase ini, pembentukan struktur-struktur baru tersebut memberikan fondasi awal untuk mengungkap sebab awal munculnya perseteruan sekaligus dasar bagi terpahaminya dinamika dan terjadinya eskalasi konflik dalam proses perkembangannya kemudian.

Episode Pertama: Berebut Klaim Atas Kepemilikan Tanah

Munculnya struktur-struktur peluang yang terjadi dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah menempatkan Goa Pindul sebagai arena perseteruan/konflik

terutama terjadi di tahun 2013. Kompas.com memberitakan (16/02/2013), perseteruan diawali ketika pihak Damayanti melakukan tuntutan kepada para pokdarwis yang telah merintis dan mengelolah Goa Pindul, atas tanah dimana objek wisata Goa Pindul itu berada. Pihak Damayanti mengklaim sebagai pemilik sah dari Goa tersebut. Klaim tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan sertifikat atas tanah yang berada di atas Goa Pindul.

Klaim tersebut diperkuat oleh fakta bahwa posisi Goa Pindul tersebut yang berada tepat di bawah tanah dan rumah Damayanti. Oleh karena itu, Goa Pindul dianggap sebagai bagian dari tanah miliknya. Sedangkan para perintis ini (pokdarwis), mengklaim bahwa Goa Pindul itu adalah milik publik, sebagaimana jalan, jembatan dan sarana umum lainnya. Klaim didasarkan pada tafsir terhadap luas sertifikat tanah Goa Pindul. Dalam sertifikat, luas tanah adalah panjang dikali lebar ($p \times l$) yang menghasilkan bujur meter persegi (m^2), sehingga secara logis, Goa yang berada di bawah tanah milik

Damayanti tidak bisa dimasukkan sebagai miliknya. Klaim Damayanti menjadi benar jika dalam sertifikat itu menunjukkan volume tanah (m^3), yaitu ($p \times l \times t$) dimana hal tersebut bisa meliputi bagian tanah di bawahnya. Klaim kedua belah pihak tersebut pada akhirnya mengarah kepada perseteruan konflik yang makin intensif.

Intensitas tersebut terjadi ketika Damayanti membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Namun, proses hukum yang ditempuh oleh pihak Damayanti tidak membuahkan hasil. Cara lain dalam upayanya memenangkan klaim hak kepemilikan adalah melalui intimidasi kepada beberapa pihak terutama para perintis yang tergabung pokdarwis. Hal tersebut dilakukan dengan membayar jasa para gali (preman). Menurut beberapa anggota pokdarwis, intimidasi dan ancaman pun terus dilakukan baik melalui handphone maupun mengirim orang yang menyamar sebagai wartawan ataupun agen lainnya.

Perlawanan Damayanti terus berlanjut dengan melakukan propaganda melalui *framing* isu yang

disebar melalui media cetak dan elektronik. Pihak Damayanti menyebarkan beberapa berita tentang ditutupnya Goa Pindul, masalah korupsi yang dilakukan oleh para agen wisata khususnya Dewa Bejo (pokdarwis), dan beberapa berita miring lainnya yang menyudutkan beberapa pihak yang berseberangan dengannya. Aksi pihak Damayanti tersebut berlanjut dengan memasang baliho besar yang menutup mulut Goa dengan menuliskan bahwa goa itu sedang ditutup untuk sementara waktu, yang diikuti dengan membangun pembatas dengan menggunakan jeruji besi untuk menghalangi orang masuk ke dalam mulut Goa Pindul.

Aksi perlawanan warga dan pokdarwis terjadi ketika terjadi banjir yang menggenangi beberapa rumah masyarakat yang berada di sekitar goa itu. Banjir tersebut disebabkan oleh jeruji-jerudi besi yang menjadi pembatas dimulut gua dipenuhi oleh sampah sehingga menyebabkan volume air Goa Pindul meninggi. Pada akhirnya, beberapa warga di sekitar daerah itu menda-tangi dan mengepung rumah Dama-yanti. Para

warga menuntut, agar baliho itu dibuka, dan pagar besi yang menghalangi pintu masuk goa pindul dibuka kembali. Ancamannya, jika pihak Damayanti tidak berkenan memenuhi permintaan para warga maka pilihanya adalah mati di tempat. Alhasil, tuntutan warga tersebut dipenuhi.

Spontanitas kerumunan masyarakat di depan rumah Damayanti menunjukkan polarisasi dan semakin meningginya intensi konflik antara pihak Damayanti dan pokdarwis bersama warga. Spontanitas tersebut bisa dipahami sebagai hasil akumulasi kekesalan pokdarwis bersama warga terhadap berbagai tindakan perlawanan yang dilakukan oleh pihak Damayanti. Penjelasan lainnya adalah terkait dengan ketegangan identitas antara pribumi dan Cina. Suami Damayanti adalah seorang keturunan Cina bernama Pohnpon, yang juga merupakan adik kandung Pak Siput.

Pak Siput merupakan aktor kunci dibalik perlawanan Damayanti dan berstatus sebagai seorang warga negara asing (WNA). Menurut beberapa orang desa, dia juga adalah

salah satu orang terkaya ketiga di D.I Jogjakarta. Dia seorang pebisnis kaya di Jogjakarta. Salah satu bisnisnya adalah bisnis burung walet di Goa pindul. Namun, karena statusnya sebagai warga negara asing (WNA), maka sesuai undang-undang yang berlaku, dia tidak bisa membeli tanah Goa Pindul tersebut. Untuk mentaktisi hal tersebut, Pak Siput menikahkan adiknya yang bernama Phonpon dengan Damayanti. Alhasil, Pak Siput bisa membeli Goa Pindul tersebut dengan mengatasnamakan Ibu Damayanti sebagai pemilik sertifikat dengan harga 25 kali lipat dari harga awal yang diajukan beberapa warga. Namun demikian, bisnis burung wallet ternyata gagal.

Pada titik ini, pembingkaiian kultural (*cultural framing*) telah berakibat pada *stereotyping* terhadap etnis Cina. Dalam kasus ini, Pak Siput dan adiknya Phonpon yang notabeneanya adalah orang Cina. Ada kondisi traumatik turunan orde baru yang masih tetap membekas didalam benak masyarakat sekitar pindul tentang bagaimana itu orang Cina. Orang Cina dianggap sebaga pebisnis, orang yang kikir dan suka

perhitungan, sehingga ketika pindul itu jatuh kepada orang cina, dalam hal ini pak Siput, maka berkah dari wisata Goa Pindul tidak akan menetes sampai kepada masyarakat sekitar pindul. *Framing* atas makna terhadap Cina ini terus diproduksi dan direproduksi oleh beberapa aktor yang kontra dengan pihak Damayanti, sehingga kebanyakan masyarakat sekitar Goa Pindul memiliki persepsi dan *stereotyping* yang sama tentang orang Cina.

Dalam sorot lain, kekuatan pokdarwis dalam berseteru dengan pihak Damayanti justru direproduksi melalui gagasan mengenai pemberdayaan, yang pada akhirnya secara efektif telah mendorong masyarakat lokal untuk mendukung pokdarwis. Model pemberdayaan Pokdarwis dimplementasikan melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan Goa Pindul dan pelatihan-pelatihan *skill* tertentu bagi masyarakat untuk mendukung kemajuan pengelolaan daerah wisata Goa Pindul. Dalam hal pemberdayaan, kehadiran objek wisata goa pindul yang dikelola oleh agen-agen wisata khususnya Dewa Bejo, Panca

Wisata, dan Wira Wisata telah memberikan efek yang besar bagi masyarakat. Hal dapat dilihat, dari banyak masyarakat daerah itu yang terserap sebagai pekerja dari agen-agen itu, diantara keterlibatan ibu-ibu PKK yang ikut andil dalam bekerja sama dengan para agen-agen wisata itu. Selain itu, para pokdarwis juga memberikan sumbangan pertahun ke Pemerintah Desa sebesar 25 juta per agen, sumbangan ke dusun, dan ke RT/RW.

Singkatnya, dampak positif dari keberadaan objek wisata Goa Pindul yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokdarwis secara efektif berhasil mendapatkan dukungan simpatik masyarakat ketika berseteru dengan pihak Damayanti. Bingkai pemaknaan ini terus direproduksi melalui jejaring informasi baik forum-forum diskusi dan pertemuan lainnya telah berhasil membingkai pemikiran masyarakat lokal bahwa Goa Pindul adalah milik publik. Pada titik ini, secara tidak langsung mekanisme relasi atau konsolidasi yang terbangun lewat

bangunan perspektif kesadaran yang sama, telah memper-temukan beberapa aktor untuk mendorong mobilisasi, eskalasi, dan perlawanan terhadap pihak Dama-yanti.

Episode Selanjutnya: *Be-ginner* vs *Pioneer*

Konflik antara pihak Dama-yanti dengan pihak pokdarwis sampai pada saat ini belum menemukan titik kompromi. Konflik selanjutnya pun muncul diantara pokdarwis secara internal dan kelompok penyedia jasa lain seperti Joki wisata maupun Gelaran Indah (GI). Selain itu, seiring dengan kemajuan wisata Goa Pindul, jumlah penyedia jasa juga ikut bertambah. Dalam hal ini, pokdarwis baru. Baik pokdarwis baru dan joki merupakan kompetitor baru (*beginner*) dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul ini. Di tahun 2013, telah terdapat 8 kelompok sadar wisata (pokdarwis), yaitu Dewa Bejo, Panca Wisata, Wira Wisata, Karya Wisata, Tunas Wisata, Meriwis Putih, dan Panji Wisata. Tercatat, hingga kini (2017) sudah terdapat 13 pokdarwis.

Dari semua pokdarwis tersebut, pokdarwis Dewa Bejo, Panca Wisata dan Wira Wisata adalah perintis objek wisata Goa Pindul (*pioneer*), yang berada satu rumpun dalam atap Dewa Bejo. Ketiga pokdarwis memiliki hak untuk mengakses langsung ke Goa Pindul. Sedangkan bagi para pokdarwis lainnya yang ingin menjadikan Goa Pindul sebagai destinasi wisata para tamu pengunjungnya diharuskan membayar setengah harga kepada salah satu dari tiga pokdarwis tersebut. Model pembagiannya adalah ketika para pengunjung yang merupakan salah satu tamu dari empat pokdarwis itu yang ingin masuk ke goa pindul, maka pihak pokdarwis yang membawa tersebut harus membayar 15.000 ribu (50%). Para pengunjung dialihkan dan difasilitasi oleh pemandu dan peralatan dari salah satu dari ketiga pokdarwis perintis.

Pembagian harga tersebut pada akhirnya menandai munculnya perseteruan diantara pokdarwis, yaitu *beginner* dan *pioneer* di tahun 2014. Bagi para *beginner* ini, Goa Pindul ini adalah milik publik, yang mestinya memiliki hak akses secara sama

seperti para *pionner*. Dengan demikian, para *beginner* ini tidak harus membayar 50% kepada para *pionner*. Asumsinya dibangun atas dasar bahwa mereka juga adalah warga desa Bejiharjo yang harusnya mempunyai hak yang sama untuk mengakses daerah wisata itu. Dengan asumsi tersebut, para *beginner* menuntut hak yang sama untuk mengelolah objek wisata Goa Pindul. Konsekuensinya, perseteruan dalam kompetisi berebut pengunjung pun akhirnya terjadi. Gilang Binangkit (2016), menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di Goa Pindul pada dasarnya disebabkan oleh adanya kecemburuan dan kurangnya koordinasi antar pengelola merupakan pemicu konflik.

Salah satu episode konflik antara pokdarwis (solopos.com, 5/12/2017) adalah ketika pokdarwis Gelaran Indah memasukan wisatawan tanpa melalui Dewa Bejo pada 11 Mei 2017. Peristiwa itu memicu kemarahan puluhan orang untuk mendatangi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul yang menuntut dite-gakkannya kesepakatan. Hal ini disebabkan

karena kesepakatan bersama tersebut belum ditetapkan secara resmi, tapi Gelaran Indah bertindak di luar nota kesepahaman bersama. Sebelumnya, diberitakan di jogja.tribunnews.com (25/9/2016) telah dibentuk nota kesepakatan bersama bahwa pengelolaan wisata Goa Pindul akan dilakukan oleh BUMDes. Namun demikian, BUMDes belum bekerja secara resmi karena berbagai persiapan administratif yang belum selesai.

Secara umum, perseteruan di Goa Pindul tersebut tampak dari persaingan mereka dalam hak pengelolaan daerah wisata tersebut. Potensi konflik untuk itu pun semakin besar. Konflik yang terjadi antara agen wisata ini memicu bagi lahirnya dinamika konflik yang mengkotak-kotakan masyarakat di daerah sekitar pindul. Horowitz (1985) menjelaskan bahwa konflik merupakan ancaman yang sangat serius bagi pemerintahan demokratis. Demokrasi berkenaan dengan masalah penyertaan dan penolaksanaan, akses kepada kekuasaan, hak istimewa seiring dengan penyertaan dan hukuman dengan penolaksanaan. Dalam

masyarakat yang sangat terkotak-kotakan, identitas kelompok memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolaksertakan

Dalam sorot *contentious politics*, konflik wisata Goa Pindul ini telah menunjukkan eskalasi yang cukup signifikan. Keterlibatan berbagai aktor dalam konflik pengelolaan Goa Pindul dengan intensitas konflik yang fluktuatif adalah fenomena kuat dari terjadinya eskalasi konflik.

Sejauh ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan berbagai pihak dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul, termasuk melibatkan Sultan Hamengkubuwono (Gubernur Yogyakarta). Pemerintah daerah Gunungkidul sendiri pada dasarnya sudah mengeluarkan peraturan daerah (perda) No. 5 tahun 2013 dalam mengatur pengelolaan objek wisata Goa Pindul. Harapan utamanya adalah terciptanya pengelolaan yang baik dan konflik tidak terjadi, termasuk melindungi ekosistem Goa. Namun demikian, berbagai upaya tersebut, hingga kini belum cukup

meredam berbagai konflik yang muncul di sekitar daerah wisata Goa Pindul. Tindakan pemerintah daerah sebagai mediator dan regulator untuk meredam dan mencegah keberlanjutan konflik ini menjadi agenda penting yang mesti segera diselenggarakan ke depan.

Penutup

Konflik yang terjadi di daerah wisata Goa Pindul merupakan salah satu fenomena politik lokal di sektor pariwisata. Meski berlangsung dalam dinamika yang fluktuatif dan masih bisa ditolerir, namun memiliki potensi mengkhawatirkan di masa depan. Sejauh ini, dinamika konflik di daerah wisata Goa Pindul telah menunjukkan adanya eskalasi konflik yang telah menggiring banyak aktor ke dalam pusaran perseteruan yang meluas. Fenomena ini bisa dilihat dari keterlibatan banyak aktor-aktor yang berkonflik, seperti para pokdarwis, pemerintah, masyarakat lokal, dan kepentingan personal. Munculnya objek wisata Goa Pindul sebagai ikon wisata menarik telah memosisikan Goa Pindul sebagai arena pertarungan klaim atas hak

pengelolaannya. Perseteruan ini pada fase pertama berlangsung melalui proses *framing* melalui kehadiran klaim kepemilikan dan klaim pemberdayaan, yaitu antara pihak Damayanti dan Pokdarwis. Fase kedua, klaim meluas tidak hanya dua pihak tersebut, tapi juga melibatkan pemerintah daerah, pokdarwis baru (*beginner*), dan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata Goa Pindul. Pada titik ini, konflik mengalami eskalasi yang meluas dalam upaya mereka untuk memperoleh hak atas pengelolaan. *Gap* sosial yaitu kecemburuan sosial dan mekanisme penyelesaian konflik pengelolaan menjadi faktor lain yang ikut memicu dinamika dan eskalasi konflik.

Dengan demikian, dari episode dan dinamika konflik yang terjadi di daerah wisata Goa Pindul tersebut, menjelaskan bahwa politik perseteruan (*contentious politics*) di sektor pariwisata tidak hanya dipahami sebagai masalah tunggal, tapi konflik tersebut merupakan pertautan kompleksitas masalah dari berbagai aktor, sektor, mekanisme dan proses. Pada titik ini, studi

mengenai konflik di sektor pariwisata ini menduduk posisinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyori. "Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu 'Antara Kebutuhan Konservasi Dan Pariwisata'." Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Binangkit, Gilang. "Konflik Antar Pengelola Pariwisata Goa Pindul, Yogyakarta." Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. London: Routledge, 1956.
- Horowitz, Donald L. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley and Los Angeles: Univ of California Press, 1985.
- Klinken, Gerry van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Li, Tania Murray. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham & London: Duke University Press, 2007.
- McAdam, Doug, John D McCarthy and Mayer N Zald. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*: Cambridge University Press, 1996.
- Nofitasari, Aprilia. "Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bejiharjo Pasca Berkembangnya Objek Wisata Goa Pindul." Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Tarrow, Sidney. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Revised and Updated Third Edition)*.

Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Van Klinken, Gerry, Henk Schulte Nordholt and Ireen Hoogenboom. *Politik Lokal Di Indonesia: Yayasan Obor Indonesia*, 2007.

Wawancara:

Bagiyo (Ketua Kelompok Dewa Bejo), wawancara tanggal 27 dan 29 desember 2013

Yanto (Kepala Desa Bejiharjo), wawancara tanggal 29 Desember 2013

Soeharto (Kepala Dusun Gelaran 1 dan Penasehat Dewa Bejo), wawancara tanggal 29 Desember 2013.

Setyo Legowo (Ketua Kelompok Karya Wisata), wawancara tanggal 14 November 2013

Media Cetak:

<http://travel.kompas.com/read/2016/03/28/100300727/15.000.Wis>

[atawan.Kunjungi.Goa.Pindul diakses 5 Mai 2017](#)

<http://travel.kompas.com/read/2013/02/16/17144639/Pengelolaan.Gua.Pindul.Diperebutkan> diakses 10 April 2017.

<http://travel.kompas.com/read/2014/10/01/154200127/Pemkab.Gunung.Kidul.Akan.Beli.Tanah.Goa.Pindul>

<http://jogja.tribunnews.com/2017-/05/09/gelaran-indah-masukkan-wisataan-tanpa-melalui-pokdarwis-dewa-bejo-wadul-ke-polres?page=2> diakses 12 Mei 2017.

<http://www.solopos.com/2017/05-12/konflik-gua-pindul-memanas-operator-gi-dihadang-operator-lain-816131> diakses 18 Mei 2017.